



PERJANJIAN KERJA SAMA
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT

Antara
PENGADILAN AGAMA PATI



Dengan
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PATI
TENTANG

PENGIRIMAN PETIKAN SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN AKSES SISTEM
INFORMASI PENELUSURAN AKTA CERAI

Nomor: W11-A14/2090/HM.01/6/2023



Nomor: 3505/ Kk.11.18/6/HM.01/06/2023

Pada hari ini, Senin tanggal 26 Juni 2023 bertempat di Pati, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Malem Puteh, S.H.M.H, Ketua Pengadilan Agama Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Pati, yang berkedudukan di Pati, Jalan Panglima Sudirman No. 67 Pati, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. H. Ahmad Syaiku, S.Ag, M.Pd , Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, yang berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman No.1-H Pati, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa Pengadilan Agama Pati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menerbitkan produk akhir berupa putusan/penetapan dan akta cerai, sebagaimana ketentuan berikut:
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

Tugas dan tanggung jawab pihak kedua:

1. Membuat atau menunjuk alamat elektronik (email) yang diberikan kepada Pengadilan Agama Pati sebagai sarana untuk mengirimkan petikan salinan putusan/penetapan perkara-perkara tersebut di atas, dan menginformasikannya kepada Pengadilan Agama Pati jika terjadi perubahan.
2. Membantu memperlihatkan asli buku nikah di depan sidang apabila pihak berperkara tidak dapat memperlihatkan kutipan atau duplikat akta nikah di depan sidang.

Pasal 5

Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini para pihak bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- a. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi terkait produk hukum Pengadilan Agama Pati dan akibat hukumnya, serta produk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati dan atau Kantor Urusan Agama Kecamatan se Kabupaten Pati, yang terkait dengan putusan/penetapan Pengadilan Agama Pati.
- b. Meningkatkan kinerja, program kegiatan terkait dengan penjaminan pengurusan administrasi perkawinan masyarakat Kabupaten Pati yang mensyaratkan produk Pengadilan Agama Pati sebagai kelengkapannya.

Ketentuan Lain

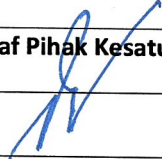

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman (MoU) ini akan diatur kemudian dalam bentuk perjanjian kerjasama, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman (MoU) ini.

Penutup

Pasal 7

Nota Kesepahaman (MoU) ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat dalam rangkap dua, Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing memegang satu rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

email (jika memungkinkan dengan teknologi yang lebih baik lagi) kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Pati melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, dan selanjutnya petikan salinan putusan/penetapan tersebut dapat diadministrasikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati dan atau Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Pati, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melayani masyarakat yang mengurus administrasi perkawinannya.

2. Pemberian user dan password oleh Pengadilan Agama Pati kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati dan Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Pati, untuk dapat mengakses aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Akta Cerai.

Jangka Waktu

Pasal 3


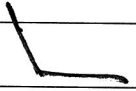
Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan para pihak.

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 4

Tugas dan tanggung jawab pihak pertama:

1. Mengirimkan petikan salinan putusan/penetapan perkara perceraian, *itsbat* nikah, wali *adhal*, dispensasi kawin, dan izin poligami, kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan alamat elektronik (email) setiap minggu atau paling lambat setiap bulan.
2. Memberikan user dan password atau memberikan informasi jika terjadi perubahan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Pati, melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, untuk dapat mengakses aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat) yang dapat digunakan untuk menguji kebenaran dan keaslian Akta Cerai yang digunakan masyarakat dalam pengurusan administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Pati.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

- d. Bahwa penyampaian petikan salinan putusan/penetapan merupakan kewajiban Pengadilan Agama Pati sesuai ketentuan tersebut di atas.
- e. Bahwa untuk mencegah terjadinya pemalsuan dan penggunaan Akta Cerai palsu, maka perlu tindakan *preventif* dari kedua belah pihak sebagai lembaga penerbit dan pengguna Akta Cerai tersebut.
- f. Bahwa selain hal-hal yang disebutkan di atas, kerjasama dengan berbagai instansi termasuk di dalamnya adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berada di bawahnya sebagai stakeholder produk Pengadilan Agama Pati, merupakan salah satu eviden pendukung program Pembangunan Zona Integritas (ZI) Pengadilan Agama Pati yang telah meraih predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) menuju predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, para pihak telah setuju dan sepakat menjalin kerja sama dan saling membantu dalam melaksanakan tugas negara, dengan membuat kesepakatan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pengiriman Petikan Salinan Putusan/Penetapan dan Akses Sistem Informasi Penelusuran Akta Cerai, dengan ketentuan sebagai berikut:

Maksud dan Tujuan

Pasal 1



Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mensinergikan program maupun peran para pihak sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan publikasi produk Pengadilan Agama Pati dan pencegahan penggunaan produk Pengadilan Agama Pati yang palsu, untuk kepengurusan administrasi perkawinan.

Ruang Lingkup

Pasal 2



Ruang lingkup kerjasama difokuskan:

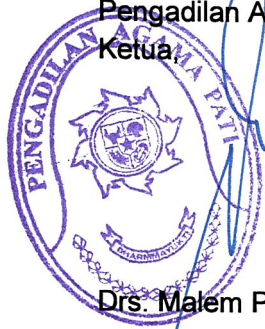
1. Untuk memfasilitasi Pengadilan Agama Pati dalam hal pengiriman petikan salinan putusan/penetapan Pengadilan Agama Pati tentang perceraian, *itsbat* nikah, wali *adhal*, dispensasi kawin, dan izin poligami, setiap bulannya via

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

- Pasal 84 ayat (1) dan ayat (4):
 - (1). Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
 - (2). Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1): "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu".
- b. Bahwa Kementerian Agama Kabupaten Pati dan Kantor Urusan Agama Kecamatan di bawahnya, sebagai pengguna informasi dari produk tersebut dan pengguna dari Akta Cerai yang diterbitkan untuk persyaratan pencatatan perkawinan bagi masyarakat yang telah berstatus janda atau duda.
- c. Bahwa Nota Kesepahaman tentang Pengiriman Petikan Salinan Putusan/Penetapan dan Akses Sistem Informasi Penelusuran Akta Cerai ini dibuat dalam rangka memudahkan masyarakat untuk mengurus administrasi perkawinan yang terkait dengan produk Pengadilan Agama Pati.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	



Pihak Pertama,
Pengadilan Agama Pati
Ketua,

Drs. Malem Puteh, S.H.M.H.



Pihak Kedua,
Kementerian Agama Kab. Pati
Plt. Kepala,

H. Ahmad Syaiku, S.Ag, M.Pd

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua